



► KINERJA PEMKOT

IKK Rendah, Program Harus Lebih Solutif

JOGJA—Capaian Indeks Kinerja Kunci (IKK) Pemkot Jogja belum menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga kini, capaian IKK Pemkot secara nasional masih berada di urutan ke-22.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan rendahnya capaian IKK Pemkot disebabkan masih lemahnya perjanjian kinerja strategis. Karena itu, dia meminta jangan ada lagi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot yang tak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat atau penyelesaian masalah.

"Untuk bisa mewujudkan program yang menyelesaikan masalah, maka diperlukan kinerja strategis," kata dia, sebelum menandatangani perjanjian kinerja strategis, di Ruang Yudhistira, kompleks Balai Kota Jogja, akhir pekan lalu.

Heroe mengatakan IKK berbicara perihal sejauh mana setiap pemerintahan daerah mampu menyusun program-program, yang selanjutnya terbukti menyelesaikan permasalahan di daerah setempat. Kalau tidak demikian, maka IKK pemerintahan tersebut akan rendah.

Walau tetap harus menyelesaikan target spesifik tiap OPD, program kerja strategis adalah program yang dikerjakan bersama-sama, bukan hanya mengandalkan satu OPD. Sifat program kerja ini harus diselesaikan adalah program kerja gabungan. Misalnya penyelesaian kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Kotagede. Selama ini wilayah dengan kasus tinggi DBD di sana kerap hanya bergantian antara Prenggan, Purbayan, Rejowinangun.

Heroe memandang itu sebagai wujud bukan lagi hanya menyoroti kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelesaian DBD, tetapi juga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). "Artinya OPD ini dinilai belum mampu menyelesaikan masalah genangan di wilayah Kotagede. Persoalan lain yang masih kami hadapi ada perbedaan data antar OPD, kita harus mulai bekerja dengan menyamakan data," ujar dia.

Data yang belum bersifat tunggal berpotensi menjadi penyebab masalah rendahnya IKK Pemkot Jogja. Contohnya, program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data yang dimiliki mengenai pelaksanaan program ini, di antara Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), DPUPKP harus sama. Bila tidak sama, Pusat akan sukar memberikan nilai maksimum. (Ulf Febriarni)

APA ITU IKK

Indeks Kinerja Kunci atau *Key Performance Indicators* (KPI), digunakan untuk menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi daerah.

Ditulis dari berbagai sumber

INDIKATOR PENGUKUR IKK

- 1 Input Indicator**
Gambaran sekilas mengenai SDM yang akan langsung bekerja sehingga bisa menghasilkan *outcome* dan juga *output*. Contohnya adalah kualitas, kehematan dan juga kuantitas.
- 2 Process Indicator**
Acuan langkah yang akan dilakukan untuk bisa menghasilkan jasa dan juga barang, seperti kedisiplinan jadwal, ketepatan terhadap standar prosedur yang berlaku.
- 3 Output Indicator**
Sebuah *output* dalam bentuk jasa atau barang yang merupakan hasil dari sebuah aktivitas.
- 4 Outcome Indicator**
Hasil nyata yang bisa berupa peningkatan kuantitas maupun kualitas; peningkatan pendapatan; akselerasi dan efisiensi proses; serta perilaku SDM yang semakin baik.
- 5 Effect Indicator**
Dampak, baik secara langsung ataupun tidak atas tujuan yang sudah ditetapkan di awal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005